

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan salafiyyah mengambil bagian yang saat ini terlibat di dunia pendidikan, turut mendukung berkembangnya kualitas masyarakat Indonesia dengan memberikan peran aktif guna mendukung dan mendorong pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, menyebarkan ilmu agama, memelihara nilai-nilai Islam, menciptakan generasi muda yang paham terkait agama dan mengajarkan Islam ke dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan yang disadari menjadi salah satu pondasi untuk memperkuat generasi muda Islam, serta Indonesia yang memerlukan dukung dari lembaga-lembaga pendidikan yang bukan hanya membangun budaya bangsa tetapi turut berperan membangun pondasi bangsa yang kuat (Kastolani, 2019).

Perkembangan lembaga pendidikan salaf di Indonesia dapat dirasakan dengan bertambah banyaknya pendakwah dan lembaga pendidikan salaf di Indonesia sampai saat ini. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan Islam Salaf menjadikannya fenomena terbaru yang cukup memberikan pengaruh terhadap pandangan kehidupan masyarakat (Muliono et al., 2019). Berdasarkan data sekolahsunnah.com saat ini yang terdata terdapat 95 sekolah SMA/SMK salaf di Indonesia. Berkembangnya sekolah salaf ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan menjadi bagian yang esensial untuk membangun masyarakat yang berkualitas.

Pendidikan menjadi faktor yang sangat sensial guna mewujudkan masyarakat beretika, bermoral, serta memiliki karakter yang baik sebagai warga negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa:

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Untuk mencapai hal tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memegang posisi yang utama dari beberapa mata pelajaran yang esensial untuk mendidik generasi muda sejak tingkat sekolah dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Ditetapkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 37, bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang harus ada pada tiap tingkatan pendidikan di Indonesia, termasuk lembaga pendidikan asing di Indonesia.

“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: 1.) Pendidikan agama; 2.) Pendidikan kewarganegaraan; 3.) Bahasa; 4.) Matematika; 5.) Ilmu pengetahuan alam; 6.) Ilmu pengetahuan sosial; 7.) Seni dan budaya; 8.) Pendidikan jasmani dan olahraga; 9.) Keterampilan/kejuruan; dan 10.) muatan lokal.”

Ruang lingkup yang cukup luas dalam muatan pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bukan sekadar menanamkan keteguhan Pancasila dalam sejarah dan ideologi bangsa, hukum dan konstitusi, ketahanan nasional, wawasan nusantara, keadaan sosial masyarakat, pendidikan moral dan nilai, juga terdapat muatan tentang politik. Sebab politik telah menjadi bagian penting dari kehidupan seluruh masyarakat, sehingga tidak ada satupun masyarakat di suatu negara yang tidak terikat dengan politik. Politik merupakan interaksi antara masyarakat dengan

pemerintah dengan maksud menyusun sebuah keputusan atau kebijakan yang menjadi keputusan bersama dan bersifat mengikat (Surbakti, 1992).

Sekolah menjadi salah satu agen sosialisasi politik di tingkat pendidikan guna membekali peserta didik berperan menjadi pelaku sekaligus partisipan dalam aktivitas politik di Indonesia. Sebab salah satu permasalahan aktivitas politik di Indonesia adalah efek rendahnya tingkat kesadaran politik warga negara terkhusus generasi mudanya (Aprilla et al., 2021). Meskipun cakupan atau kompetensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bermuatan politik. Namun dalam konteksnya muatan materi politik di sekolah lebih ditekankan kepada pengetahuan mengenai sistem hukum, lembaga pemerintahan, sistem dan perilaku politik, hubungan internasional, kecakapan sikap dalam merespon fenomena politik yang terjadi, dan dalam berpartisipasi di kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat diringkas menjadi tiga kompetensi pendidikan kewarganegaraan (Arliman Simbolon, 2019), yaitu *Civic Knowledge*, *Civic Skills*, dan *Civic Disposition*.

Tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan fase terpenting peserta didik dalam proses pendewasaan serta pendidikan tiap individu, karena di fase ini banyak informasi yang mereka dapatkan dan coba diimplementasikannya secara langsung di lingkungannya. Fase ini menuntut tiap individu berusaha semaksimal mungkin agar meningkatkan beberapa aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, termasuk pendidikan politik sebagai bekal agar nanti ketika dewasa mereka menjadi melek politik dan tidak termakan oleh opini-opini pembodohan politik. Sehingga adanya muatan materi politik ini supaya peserta didik mempunyai kecakapan untuk lebih kreatif, rasional dan kritis dalam berpikir merespons

permasalahan-permasalahan kewarganegaraan, seperti semangat melawan korupsi, bertanggung jawab serta aktif dalam aktivitas politik, membangun warga negara yang berkualitas dan berkarakter, sesuai kaidah-kaidah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun Indonesia Tahun 1945.

Kartini & Kartono (dalam Hamisa & Murdiono, 2018) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan pada tingkatan sekolah memiliki fungsi penting bagi pendidikan politik peserta didik. Di antara tujuannya adalah mewujudkan rakyat menjadi sadar politik. Yang dimaksud sadar politik adalah mereka mengetahui segala hak dan kewajiban warga negara. Kesadaran politik ini dipengaruhi dari perhatian dan minat peserta didik terhadap dinamika yang ada di lingkungan masyarakat dan politik negaranya (Surbakti, 1992). Oleh Karena itu, dalam meningkatkan kesadaran politik peserta didik bisa diusahakan melalui pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Asumsi dikuatkan sebagaimana tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk mengedukasi politik dalam artian pelajaran ini menyajikan gambaran terkait wawasan, kecakapan dan sikap seorang yang baik sebagai warga negara disertai dengan kemampuan berpartisipasi politik (*political participacion*) yang tinggi, sadar akan politik (*political awareness*), dan kemelekan politik (*political literacy*). Menurut Easton dan Dennis dikutip (dalam Dhekawati, 2015) menjelaskan dalam sosialisasi politik diri anak-anak terdapat empat fase perkembangan, yaitu: 1) mengenalkan pada kewenangan dan kekuasaan individu tertentu, 2) mengenalkan perbedaan kewenangan dan kekuasaan institusi-institusi politik, 3) mengenal peran, tugas, dan aktivitas institusi-institusi politik, 4) membedakan kewenangan dan kekuasaan tiap

institusi-institusi politik dan mengajak peserta didik aktif terhadap kegiatan institusi-institusi tersebut.

Sebagai salah satu sekolah Islam, sekolah salaf memasukkan muatan nilai-nilai Islam berlandaskan pemahaman salaf dalam pelajaran-pelajaran umum. Termasuk bagaimana memahami muatan materi politik dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalangan salaf tetap mencoba memberikan peranannya dalam politik sebagai warga negara yang melekat padanya hak dan kewajiban (Rahmanul Hakim, 2014). Sebab dalam Islam juga telah memberikan panduan tentang kehidupan berpolitik dan tidak melarang pengikutnya untuk berpolitik yang merupakan bagian dari hak manusia (Arifin & Rohmah, 2019). Termasuk di dalamnya mengenai memilih pemimpin yang baik, menyikapi berbagai perilaku pemimpin, baik dan buruknya, dan lainnya. Terkait dengan muatan materi politik, terdapat bagian dari nilai-nilai Islam yang membahas mengenai kaidah-kaidah hukum dalam agama Islam, mencakup: 1.) Memperlakukan pemimpin secara adil; 2.) Mematuhi pemimpin yang sah; 3.) Musyawarah antara pihak penguasa dan masyarakat (Ayunanda, 2018). Hal inilah di antara keyakinan yang dipegang teguh oleh salaf adalah dalam hal berpolitik dan bernegara. Mereka berkewajiban untuk taat terhadap pemerintah yang sah selama tidak bertentangan dengan agama, melarang sikap demonstrasi, dan menghindari partai-partai politik. Semua aktivitas Salaf dalam kehidupan, terkhusus dalam bersikap mengenai fenomena-fenomena politik telah diberikan arahan dalam agama. Hubungan antara agama dengan negara ini tidak terlepas dari kewajiban kalangan salaf dalam mematuhi pemimpin (Sunarwoto, 2020). Hal ini menjadi keyakinan yang menjadi pedoman sikap politik masyarakat yang berpaham salafyyah.

Suatu pandangan atau ideologi memiliki pengaruh terhadap penyampaian materi muatan politik pada proses pembelajaran di kelas, terlebih dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tidak menutup kemungkinan nilai-nilai dalam agama difungsikan sebagai pedoman dalam berpolitik (Tienti, 2013). Perbedaan muatan materi politik di sekolah salaf disebabkan adanya peranan kurikulum tersembunyi yang secara implisit di samping kurikulum nasional yang mampu mengembangkan pembelajaran muatan materi di politik khususnya (Salman Alfarisi, 2021). Kurikulum tersembunyi ini mencakup di dalamnya berbagai kepentingan, budaya, perjuangan, kesepakatan, dan kompromi yang terjadi di luar sekolah. Sehingga meski pengembangan kurikulum berbasis sistem pendidikan nasional (K-13), namun dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan diterapkan berdasarkan nilai-nilai Islam menurut pemahaman salafus shalih. Manajemen kurikulum ini memiliki peran yang cukup penting dalam mengelola sekolah, karena indikator capaian sekolah terdapat pada konsep pengembangan kurikulum (Nugroho, 2021). Dasar pendidikan sekolah Islam yang secara umum dapat dikatakan cukup ideal dan baik, terlebih dengan ditambahkannya al-ittiba menjadi visi dan misi sekolah Islam salaf (Kastolani, 2019) . Hal ini diharapkan dapat menciptakan pemimpin-pemimpin agama dan negara dari generasi muda Islam (Hanafi, 2018). Sehingga tercipta warga negara yang baik, sebab salaf mengarahkan proses yang perlahan dan berjenjang di mulai dari yang dasar dalam mereformasi politik dengan melakukan pendidikan kepada masyarakat mengenai kewajiban dan hak warga negara sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara (Suhilman, 2019). Oleh karena itu, dalam menyusun proses kegiatan pembelajaran, sebagai sekolah nasional sekolah salaf

terus berupaya sejalan standar pendidikan nasional dengan tetap memperhatikan panduan para imam generasi Islam terbaik. Sehingga esensi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terkhusus muatan materi politik di sekolah berdampingan dengan muatan-muatan Islam.

Dari latar belakang telah menggambarkan bahwa pendidikan politik juga dimuat di sekolah salaf, dan muatan pendidikan politik dituangkan pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sehingga berdasarkan penjelasan sebelumnya, pada kesempatan penelitian, peneliti mengambil sekolah salaf sebagai objek penelitian dengan harapan dapat memperoleh sebanyak-banyaknya terkait apa muatan materi politik dan bagaimana metode pembelajaran dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah salaf. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu “Analisis Muatan Materi Politik dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Salaf”.

B. Masalah Penelitian

Setelah dijabarkan latar belakang dilaksanakannya penelitian mengenai analisis muatan materi politik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah salaf yang dijabarkan sebelumnya, peneliti mencoba memaparkan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Adanya penyesuaian muatan materi politik dalam pembelajaran PPKn di sekolah sesuai dengan pemahaman salaf.
2. Guru memiliki peranan penting dalam menyampaikan muatan materi politik dalam pembelajaran PPKn sesuai RPP yang digunakan.

3. Guru memiliki peranan penting dalam menyampaikan muatan materi politik dalam pembelajaran PPKn agar sesuai dengan pemahaman salaf.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian kali ini peneliti memilih untuk berfokus pada muatan materi politik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 pada di sekolah salaf di SMA Future Gate, Bekasi. Fokus yang telah ditentukan terbagi lagi menjadi dua subfokus, yaitu:

1. Muatan materi politik dalam pembelajaran PPKn di sekolah salaf
2. Muatan materi politik dalam pembelajaran PPKn SMA kelas 10 di sekolah salaf

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui muatan materi politik yang diajarkan dalam pelajaran PPKn di sekolah salaf.
2. Mengetahui pendekatan materi ilmu politik dalam pelajaran PPKn di SMA Future Gate Bekasi.
3. Mengetahui metode pembelajaran yang digunakan guru PPKn ketika mengajarkan muatan materi politik di SMA Future Gate.

E. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah dalam pembelajaran PPKn di sekolah Islam salaf ada muatan politik yang disampaikan guru?

2. Muatan politik apa saja yang disampaikan guru dalam pembelajaran PPKn di sekolah Islam salaf?
3. Bagaimana metode pembelajaran muatan politik yang dilakukan guru dalam pembelajaran PPKn di sekolah Islam salaf?

F. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan menurunkan beberapa manfaat diantaranya:

a. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap memperoleh banyak dan memperluas wawasan bagi yang membaca. Dapat pula digunakan oleh mahasiswa didik yang berkeinginan melaksanakan penelitian semisal sebagai referensi, dengan ruang lingkup yang lebih lebar. Juga diharapkan mampu menambah referensi mahasiswa didik terkait muatan materi politik dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di lingkungan sekolah, serta bisa digunakan sebagai sumber untuk penelitian selanjutnya terkhusus bagi Prodi PPKN.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang didapat bisa menyebarkan kebermanfaatan melalui informasi mengenai analisis muatan materi politik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah Islam Salaf. Bagi peneliti sendiri, hal ini memperkaya pengalaman, pengetahuan dan wawasan, serta semakin memperjelas gambaran mengenai muatan materi politik dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah Islam Salaf.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep yang terbentuk pada penelitian ini dilihat adanya muatan materi politik yang tetap disampaikan dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah salaf, meski terdapat muatan yang perlu penyesuaian dari sisi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pemahaman manhaj salaf, seperti demonstrasi, hak dan kewajiban, dan adab terhadap pemerintah. Berdasarkan penjabaran analisis sebelumnya, peneliti menata kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

(Analisis Muatan Materi Politik dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Salaf)

Memantabatkan Bangsa